

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Perubahan iklim merupakan perubahan substansial iklim bumi yang berlangsung dalam jangka waktu tertentu, dan dapat merubah suhu bumi menjadi lebih hangat, menjadi lebih panas atau kering, bahkan menjadi lebih dingin atau basah. Perubahan iklim dapat terjadi apabila perubahan sistem iklim bumi dapat menyebabkan pola cuaca yang berbeda dari cuaca sebelumnya, dan bertahan selama beberapa tahun, dekade, bahkan beberapa abad. Namun, perubahan iklim yang terjadi pada akhir-akhir ini merupakan perubahan iklim terparah dan belum pernah terjadi sebelumnya. Faktor utama terjadinya perubahan iklim adalah aktivitas manusia yang meningkat seiring berjalannya waktu dan berkembangnya teknologi. Untuk menangani perubahan iklim, dibentuklah organisasi-organisasi internasional yang membahas isu perubahan iklim, beberapa diantaranya adalah IPCC dan UNFCCC. Menurut laporan IPCC yang telah dikeluarkan pada tahun 2007, pemanasan global telah terbukti dengan meningkatnya suhu rata-rata udara dan laut, mencairnya salju dan es secara cepat, serta naiknya permukaan laut. UNFCCC adalah sebuah organisasi internasional yang dibentuk pada tahun 1992 dan berlaku pada tahun 1994, yang khusus untuk menangani perubahan iklim global. Kemudian, pada tahun 2015, dibentuklah Paris Agreement dalam naungan UNFCCC, yang dimana hampir seluruh negara di dunia meratifikasi Paris Agreement. Paris Agreement mengharuskan seluruh negaranya untuk menyerahkan upaya terbaik mereka dalam isu perubahan iklim melalui NDC kepada UNFCCC.

Perubahan iklim yang melanda negara-negara ASEAN pun dapat menyebabkan perubahan yang signifikan pada pola curah hujan, meningkatnya terjadinya cuaca yang buruk, suhu menjadi lebih tinggi atau menjadi lebih panas, dan juga naiknya permukaan laut di wilayah pesisir. Selain itu, dengan luas hutan yang mencapai 203 juta ha, negara ASEAN setidaknya menyumbang 5,2% dari hutan global. Namun, selama 20 tahun terakhir, kebakaran hutan di ASEAN pun

meningkat dan menyebar pula ke wilayah yang lebih luas. Mengakibatkan terjadinya dampak perubahan iklim yang ekstrem, seperti tanah longsor, banjir, dan kekeringan yang lebih berbahaya dari sebelumnya.

Dengan itu, negara ASEAN pun meratifikasi Paris Agreement dan telah menyerahkan NDC mereka masing-masing kepada Sekretariat UNFCCC. Kemudian, ASEAN juga memperkuat kerja sama mereka dalam mitigasi perubahan iklim untuk mengurangi dampak yang akan diterima. Mengembangkan strategi jangka panjang untuk ASEAN akan menjadi salah satu kunci untuk menginformasikan dan memandu perencanaan kebijakan sektoral dan lintas sektoral di anggota ASEAN yang sejalan dengan tujuan jangka panjang Paris Agreement. Selain itu, karena kerentanan negara ASEAN terhadap dampak perubahan iklim, ASEAN pun memiliki kemajuan yang stabil di bidang yang berhubungan dengan adaptasi perubahan iklim, seperti adanya promosi terhadap pengetahuan tentang perubahan iklim kepada masyarakat lokal. Dalam ASEAN, terdapat beberapa kelompok kerja yang membahas isu-isu penting, seperti AWGCC yang membahas isu perubahan iklim dan AWGFCC yang khusus untuk membahas potensi dan peran hutan dalam mitigasi perubahan iklim. Selain itu, ASEAN telah merespon perubahan iklim dengan berfokus pada implementasi tindakan yang sesuai dengan ASCC Blueprint 2025. ASCC Blueprint 2025 ini akan diwujudkan oleh negara ASEAN dengan dipandu AWGCC Action Plan yang memiliki aksi-aksi prioritas hingga tahun 2025 nanti.

Untuk menjawab rumusan masalah penelitian ini, yaitu bagaimana kebijakan Indonesia, sebagai salah satu negara di ASEAN, dalam mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) berdasarkan target NDC Paris Agreement. Melihat bagaimana rentannya Indonesia terhadap perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi GRK Indonesia sebagai upaya untuk menanggulangi perubahan iklim. Salah satu langkah Indonesia dalam mencapai target penurunan emisi GRK adalah dengan melakukan rencana aksi mitigasi di sektor energi dengan target penurunan sebesar 314,03 MtCO_{2e} pada tahun 2030. Selain itu, Indonesia juga telah mengeluarkan Long-Term Strategy for Low Carbon and Climate Resilience (LTS-LCCR). LTS-LCCR ini memiliki peran yang penting dalam Visi Indonesia 2045. Dalam dokumen LTS-LCCR, Indonesia

dikatakan masih akan menggunakan batubara sebagai sumber listrik. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya porsi untuk PLTU dengan menggunakan teknologi CCS/CCUS.

Dalam AWGCC Action Plan, terdapat 3 kegiatan yang akan dipimpin oleh Indonesia, yaitu adaptation and resilience (adaptasi dan ketahanan), mitigation (mitigasi), dan technology transfer (transfer teknologi). Dengan adanya AWGCC ini, Indonesia dapat bertukar informasi dengan negara ASEAN lainnya perihal isu perubahan iklim. Indonesia dan negara ASEAN lainnya, dapat berdiskusi dan fokus akan isu perubahan iklim, seperti bertukar pengalaman dan pembelajaran tentang aksi iklim dengan negara ASEAN, kemudian saling belajar tentang dampak iklim dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan, serta dapat mempromosikan dan meningkatkan ilmu tentang perubahan iklim. Selain itu, ada satu kelompok kerja di ASEAN yang dipelopori dan dipimpin oleh Indonesia, yaitu AWGFCC. Meskipun terdengar sama, namun AWGFCC dan AWGCC adalah kelompok kerja yang berbeda. Dalam AWGFCC, negara ASEAN, termasuk Indonesia, akan mempraktikkan pengelolaan hutan lestari, termasuk aforestasi, reboisasi, serta REDD+ untuk mengutamakan potensi dan peran hutan dalam aksi mitigasi perubahan iklim.

6.2. Saran

Berdasarkan data dan hasil yang penulis dapat pada penelitian mengenai Kebijakan Indonesia sebagai Negara ASEAN dalam mengurangi emisi GRK berdasarkan NDC Indonesia, penulis berpendapat bahwa sebaiknya Indonesia memantapkan kembali ambisi dan target untuk pengurangan emisi GRK ini. Melihat dari hasil yang ditunjukkan mitigasi perubahan iklim, target Indonesia untuk tahun 2030 belum bisa mencapai target yang ditetapkan Paris Agreement. Sehingga, Indonesia perlu meningkatkan target pengurangan emisi GRK-nya, mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara penghasil emisi karbon terbanyak di dunia dan salah satu negara yang paling rentan terhadap dampak perubahan iklim karena letak geografisnya. Selain itu, dapat dilihat dari emisi yang dihasilkan Indonesia dari perubahan tata guna lahan yang merupakan peringkat kedelapan dari sumber emisi global. Kemudian, dengan adanya LTS-

LCCR 2050, dimana Indonesia menuangkan strategi jangka panjang untuk tahun 2050, membuat Indonesia semakin terlihat tidak konsisten untuk mencapai target NDC-nya pada tahun 2030. Maka dari itu, penulis menyarankan untuk pihak yang terkait, agar membuat keputusan atau kebijakan yang lebih tegas untuk pengurangan emisi GRK ini. Dapat dikatakan bahwa target NDC Indonesia memang cukup baik, namun, pihak yang berkaitan perlu untuk memantapkan resolusi dan kepentingan Indonesia perihal masa depan iklim Indonesia.